Perlindungan Hukum Melalui Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Penelitian Di Kabupaten Aceh Jaya)

Legal Protection Through Restitution of Children Victims of Sex Crimes (Research In Aceh Jaya Regency)

Erlin Ritonga ^{1)*}, Mohd. Din ^{2)*} & Sulaiman ^{3)*}

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala, Indonesia

Diterima: Juli 2021; Disetujui: Desember 2021; Dipublish: Desember 2021

*Corresponding Email: erlinritongash@gmail.com, m_din@unsyiah.ac.id, sulaiman.fh@unsyiah.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual melalui restitusi yang sebagaimana diamanahkan dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi. Perpres tersebut merupakan amanat langsung dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dalam hal penderitaan atau kerugian yang bersifat materil yang dialami oleh korban sebagai akibat dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh orang lain, sudah sepantasnyalah pelaku perbuatan pidana (orang lain tersebut) yang menyediakan ganti rugi. Restitusi kepada korban kejahatan di dalam konteks hubungan pelaku dan korban, merupakan suatu perwujudan dari resosialisasi tanggung jawab pelaku sebagai warga masyarakat. Melalui proses resosialisasi dimaksudkan dan diharapkan tertanam rasa tanggung jawab sosial dalam diri si pelaku, sehingga nilai restitusi dalam hal ini tidak terletak pada kemanjurannya membantu korban, namun berfungsi sebagai alat untuk lebih menyadarkan pelaku perbuatan pidana atas "hutangnya" (akibat perbuatannya) kepada korban. Kajian ini menyimpulkan Di Aceh Jaya sendiri masih terdapat perlindungan hukum yang belum dapat diterapkan dalam pelaksanaan Restitusi kasus kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini dikarenakan karena si anak maupun keluarganya enggan datang ke Kantor Polres Aceh Jaya untuk kelanjutan penyelidikan.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Restitusi; Kejahatan Seksual.

Abstract

This research aims to provide legal protection for child victims of crime through restitution as mandated in the law. Presidential Regulation (Perpres) Number 75 of 2020 concerning the Implementation of the Rights of Child Victims and Witness Children. The Presidential Regulation is a direct mandate of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System. In terms of suffering or material loss experienced by the victim as a result of a criminal act committed by another person, it is appropriate that the perpetrator of the criminal act (the other person) provides compensation. Restitution to victims of crime in the context of the relationship between the perpetrator and the victim, is a manifestation of the resocialization of the responsibility of the perpetrator as a citizen. Through the resocialization process, it is intended and expected to instill a sense of social responsibility in the perpetrator, so that the value of restitution in this case does not lie in its efficacy in helping victims, but serves as a tool to make the perpetrators of criminal acts more aware of their "debt" (due to their actions) to the victim.

Keywords: Legal Protection; Restitution; Sexual Crimes.

How to Cite: Ritonga, E. Din, M. & Sulaiman (2021). Perlindungan Hukum Melalui Restitusi Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual (Penelitian Di Kabupaten Aceh Jaya), *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 8 (2) 2021 : 121-129

PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah juga bertanggungjawab untuk menyediakan fasilitas dan *aksebilitas* bagi anak, terutama dalam menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera (RAHMAN, n.d.)

Pasal 1 angka 1 poin 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Anak perlu mendapat perlindungan dari kesalahan penerapan peraturan Perundang-Undangan yang diberlakukan terhadap dirinya, yang menimbulkan kerugian mental, fisik, dan sosial. Perlindungan anak dalam hal ini disebut perlindungan hukum/ yuridis (*legal protection*) (Mohara, 2018). Tumbuh kembang anak sejak dini adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan negara (Sirait, 2017).

Dalam Pasal 1 angka 1 poin 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi

secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan menurut Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi Menyebutkan bahwa Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Anak Saksi dan anak korban yang dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Salah satu upaya dari pemerintah pusat terkait meningkatnya kasus kejahatan seksual terhadap anak adalah dengan dimasukkannya hukuman kebiri sebagai pemberatan bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak (SIHOMBING, n.d.). Adanya hukuman kebiri sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Pada Pasal 81 ayat (7) menyebutkan: "Terhadap pelaku yang dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan cip".

Hukuman kebiri dengan cara menyuntikkan zat kimia terhadap pelaku kekerasan seksual pada hakikatnya juga belum tentu efektif. Pelaku harus diberi efek jera seperti diasingkan dari kehidupan biasa (Hasyim, 2017). Saat pengasingan tersebut, mereka juga diberikan edukasi dan terapi sehingga mengubah sikap ke arah yang lebih baik. Selain diasingkan, pelaku juga harus tetap dihukum sesuai dengan perbuatan yang dilakukan. Bila pelaku hanya diberikan hukuman penjara tanpa adanya terapi,

ditakutkan pelaku kembali melakukan tindakan tak senonoh dan mencari korban baru (SARAH, 2017). Karena itu, peran pemerintah dalam melakukan penguatan edukasi tentang perlindungan anak sangatlah dibutuhkan. di masyarakat memiliki efek positif pada kekerasan seksual anak.

Dalam pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materil dan/atau imateril yang diderita korban atau ahli warisnya. Pasal 2 ayat (1) PP Nomor 43 Tahun 2017 menyebutkan bahwa Setiap Anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menerima 4.885 pengaduan kasus pelanggaran hak anak sepanjang tahun 2018. Jumlah kasus yang diadukan ke KPAI bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun (RISKA, 2019). Ada peningkatan jumlah kasus pada 2018 yaitu sekitar 300 kasus, jika dibanding 2017. "Kasus pengaduan yang masuk di KPAI, tahun 2015 berjumlah 4.309 kasus, kemudian tahun 2016 mencapai 4.622 kasus, selanjutnya tahun 2017 berjumlah 4.579 kasus dan tahun 2018 mencapai 4.885" (Deviana, 2018).

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) juga mencatat ada peningkatan kasus kekerasan seksual pada anak yang terjadi sejak 2016 sejumlah 25 kasus, lalu meningkat pada 2017 menjadi 81 kasus, dan puncaknya pada 2018 menjadi 206 kasus. Angka tersebut terus bertambah setiap tahun. Selain itu, kenaikan juga terjadi pada permohonan perlindungan dan bantuan hukum tindak pidana kekerasan seksual pada anak. Pada tahun 2016, ada 35 korban, lalu meningkat

pada 2017 sejumlah 70 korban, dan sebanyak 149 korban pada 2018.

Di Aceh kasus kekerasan terhadap anak dari tahun ke tahun juga meningkat secara signifikan. Pada tahun 2017 meningkat drastis dibandingkan 2016. Tahun 2016 hanya ada sekitar 937 kasus sedangkan tahun 2017 meningkat menjadi 1.104 kasus. Dari 23 kabupaten/kota di Aceh, kekerasan terhadap anak paling tinggi terjadi di Kabupaten Aceh Utara, Banda Aceh dan Aceh Besar" (Sari, 2018).

Di Kabupaten Aceh Jaya, kasus kejahatan seksual terhadap anak terjadi peningkatan. Data dari Polres Aceh Jaya menyebutkan bahwa kasus kejahatan terhadap anak sebagai pelaku kejahatan seksual ditahun 2016 terdapat 7 kasus. Sedangkan terhadap anak sebagai korban terdapat 6 kasus, 3 kasus diantaranya sudah P 21. Pada tahun 2017 sudah terdapat 5 kasus terhadap anak sebagai korban kejahatan seksual, sedangkan kasus terhadap anak sebagai pelaku belum ada. Tahun 2018 sampai dengan Juli 2019 sudah ada 9 kasus anak sebagai korban. Data ini berbeda dengan data dikantor Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Aceh Jaya.

Berdasarkan data di kantor P2TP2A ini, kasus kejahatan seksual terhadap anak yang sudah tercatat di Tahun 2017 sebanyak 17 kasus, tahun 2018 sebanyak 8 kasus, dan sampai Juli 2019 sudah tercatat sebanyak 5 kasus. Sebagian besar dari kasus tersebut didominasi anak sebagai korban kekerasan seksual, sedangkan kasus anak sebagai pelaku tercatat 5 kasus yang bersumber dari data penulis dapatkan dari Polres Aceh Jaya, Kantor P2TP2A dan Dinas Sosial Aceh Jaya dengan cara wawancara dengan Kanit PP-PA, Kabid P2TP2A dan Kepala Dinas Sosial

Berdasarkan data dari Polres Aceh Jaya ditemukan 12 (dua belas) kasus perkosaan / pencabulan terhadap anak dari tahun 2016 sampai dengan 2018 yang sudah P21. Semua pelaku dalam kasus

tersebut dikenakan hukuman penjara sesuai Undang-undang Perlindungan Anak, namun tidak satu pun yang dikenakan Restitusi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Digunakan jenis penelitian ini karena penelitian langsung berhubungan dengan masyarakat yang akan diteliti. Jenis penelitian ini dilaksanakan dengan cara menganalisa data dan wawancara. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum dan upaya untuk menganalisisnya kemudian mencari solusi permasalahan atas gejala tersebut (Soekanto, 2001). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhammad, 2004)

Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dihasilkan langsung dari penelitian lapangan, yang diperoleh langsung dari responden penelitian terkait dengan permasalahan penelitian ini. Dengan mengadakan studi kepustakaan akan diperoleh data awal untuk dipergunakan sebagai bahan awal dalam melakukan penelitian lapangan (Soemitro, 1988).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konteks Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual

Konteks adalah bagian suatu uraian atau kalimat yang dapat mendukung atau menambah kejelasan makna. Konteks juga dapat diartikan sebagai situasi yang ada hubungannya dengan suatu kejadian (Mahtumah, 2021). Ada beberapa jenis

konteks. Konteks fisik meliputi ruangan, objek nyata, pemandangan, dan lain sebagainya. Konteks menurut faktor sosio-psikologis menyangkut faktor-faktor seperti status orang-orang yang terlibat dalam hubungan komunikasi, peran mereka, dan tingkat kesungguhannya (Suhartanto, 2017). Dimensi pemilihan waktu atau tempo suatu konteks meliputi hari dan rentetan peristiwa yang dirasakan terjadi sebelum peristiwa komunikasi.

Perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku (Mashudi, 2017). Dengan demikian, suatu perlindungan dapat dikatakan sebagai perlindungan hukum apabila mengandung unsur-unsur sebagai berikut;

- a) Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya.
- b) Jaminan kepastian hukum.
- c) Berkaitan dengan hak-hak warga negara.
- d) Adanya sanksi hukuman bagi pihak yang melanggarnya.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, perlu adanya upaya preventif maupun represif yang harus dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, bantuan hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang fair terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dan perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Dari sinilah dasar filosofis dibalik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Perlindungan korban dapat mencakup bentuk perlindungan yang bersifat abstrak (tidak langsung) maupun yang konkret (langsung). Perlindungan yang abstrak pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang hanya bisa dinikmati atau dirasakan secara emosional (psikis), seperti rasa puas (kepuasan). Perlindungan yang kongkret pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan yang dapat dinikmati secara nyata, seperti pemberian yang berupa atau bersifat materi maupun non materi.

Namun dalam pemberian perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor tersebut. Menurut Soejono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut (Soerjono, 2019).

- a) Faktor hukumnya sendiri
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- e) Faktor kebudayaan, yakni hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Perlindungan Hukum yang Belum Terealisasi dalam Pelaksanaan Restitusi Kasus Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai

dengan kemampuan demi kepentingan nusa dan bangsa. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum. Oleh karenanya, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Jan Michiel Otto menyebutkan bahwa kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis namun Otto juga memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh, untuk itu ia mencoba mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan dalam situasi tertentu antara lain (Afdhaliyah et al., 2019):

- a) Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b) Instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c) Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan tersebut.
- d) Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak, menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum.
- e) Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Identitas korban dalam tahap penyidikan sangat dirahasiakan, ketika kasus pencabulan tersebut dimuat dalam media cetak maupun media elektronik Unit PPA memberikan penyamaran terhadap identitas para korban dengan menyebutkan inisial para korban atau

menyebutkan nama benda lain seperti “Mira” , “Marni” dan sebagainya untuk menghindari gangguan psikologis pada korban.

Temuan dilapangan, sebagaimana yang disampaikan oleh Kabid PP dan PA Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana (DPMPKB) yang menaungi P2TP2A Suryani, SKM bahwa tidak jarang unit PPA Polres Aceh Jaya bekerjasama dengan unit P2TP2A Aceh Jaya berangkat ke kediaman korban untuk meminta keterangan terkait adanya laporan kejahatan seksual yang menimpa si anak. Hal ini dikarenakan karena si anak maupun keluarganya enggan datang ke Kantor Polres Aceh Jaya untuk kelanjutan penyelidikan. Meskipun pihak penyidik sudah berkali-kali mengirim surat pemanggilan melalui keuchik setempat, namun sering tidak membuahkan hasil, sehingga pihak Polres dan P2TP2A yang harus jemput bola ke lapangan (Hasil Wawancara dengan Kabid PP dan PA unit P2TP2A Aceh Jaya Suryani, SKM Tanggal 25 Agustus 2020 diruangan Bidang PP dan PA DPMPKB Aceh Jaya).

Kendala lain yang menyulitkan bagi penyidik dan pihak P2TP2A, tempat kediaman baru yang merupakan hak anak korban kejahatan seksual untuk mendapatkan tempat kediaman baru belum dapat diberikan. Di Aceh Jaya belum ada shelter (rumah aman) bagi korban dikarenakan tidak adanya biaya. Selain itu ruangan unit PPA Polres Aceh Jaya sangat kecil hanya berukuran 2,5x3M sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan penyidikan tertutup.

Namun Di Aceh Jaya korban kejahatan seksual belum ada yang mendapatkan ganti rugi atau restitusi. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan pihak penyidik dan unit PPA Polres Aceh Jaya tentang adanya Undang-undang Nomor 43 Tahun 2017 tentang Restitusi (Hasil Wawancara dengan BA Unit PPA Polres Aceh Jaya Jummi Oftarika Tanggal 5 Juli 2020 di Ruangan Unit PPA Polres Aceh Jaya Desa Keutapang Kecamatan Krueng Sabee Calang). Selama ini mereka hanya melihat aspek hukum yang dilanggar oleh

pelaku saja, sehingga hasil penyidikan juga tidak memuat restitusi yang merupakan hak-hak korban tindak pidana kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini dapat dilihat dari data yang penulis dapatkan dari Pengadilan Negeri Calang. Dari Tahun 2016 s.d 2018 terdapat 12 (dua belas) perkara yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap (BHT), yakni tahun 2016 terdapat 4 (empat) perkara, tahun 2017 ada 5 (lima) perkara dan ditahun 2018 ada 3 (tiga) perkara. Semua perkara yang sudah BHT tersebut tidak ada satupun perkara yang diputus Restitusi.

Hambatan-hambatan dalam Pemberian Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kejahatan Seksual

Kondisi praktek penegakan hukum bagi korban malah terdiskriminasi dalam perolehan perlindungan. Korban sering dijadikan sebagai saksi untuk mengungkap sebuah peristiwa pidana, tanpa melihat bagaimana selayaknya korban diperlakukan. Korban dari sebuah kejahatan bukan hanya menderita secara materi, fisik melainkan juga kerugian psikis yang mengakibatkan terganggunya jiwa seorang tersebut, bahkan dalam kondisi anomie yang akut mengakibatkan terjadinya bunuh diri. Bentuk perlindungan korban kejahatan dalam peraturan perundang-undangan masih bersifat parsial, sehingga berakibat perlindungan hukum terhadap korban lemah. (Yusrizal, Saputra, Bahreisy:2021)

Secara garis besar, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban kejahatan seksual di Kabupaten Aceh Jaya terdapat beberapa hambatan-hambatan, antara lain:

- 1) Kesadaran Hukum Korban dan keluarganya. Kesadaran hukum lebih merupakan hasil pemikiran, penalaran, dan argumentasi yang dibuat oleh para ahli, khususnya ahli hukum. Kesadaran hukum adalah abstraksi (para ahli) mengenai perasaan hukum dari para subjek hukum. Dalam penerapan

perlindungan hukum terhadap korban kejahatan seksual banyak dijumpai korban atau keluarganya menolak untuk melaporkan kejahatan yang menimpanya dengan berbagai alasan, seperti takut adanya ancaman dari pelaku, ketakutan apabila masalahnya dilaporkan akan menimbulkan aib bagi korban maupun keluarganya. Dari hasil temuan dilapangan sebagian besar keluarga korban tidak mau kasus anaknya diproses dikepolisian dikarenakan malu dan menganggap musibah yang menimpa anaknya adalah aib yang harus ditutupi dan dirahasiakan. Padahal, dari segi yuridis sikap pembiaran ini dapat merugikan korban sendiri, berupa penderitaan yang berkepanjangan.

- 2) Fasilitas Pendukung. Aparat Penegak hukum tidak dapat menjalankan wewenangnya dengan lancar apabila tidak didukung oleh fasilitas pendukungnya, karena itu fasilitas pendukung masuk pada struktur hukum, sedangkan kesadaran hukum pada hakikatnya juga merupakan budaya hukum. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung dalam upaya perlindungan korban kejahatan seksual di Aceh Jaya yang paling nyata dirasakan adalah pada perlindungan korban perkosaan, baik anak maupun perempuan.
- 3) Sumber Daya Manusia. Di Polres Aceh Jaya sendiri jumlah Polwan hanya ada 5 orang, dan yang ditugaskan di unit PPA hanya 2 orang. Jelas jumlah ini sangat kekurangan mengingat kasus kejahatan seksual terhadap anak dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir di Aceh Jaya termasuk tinggi. Belum lagi kasus-kasus anak lainnya, ditambah lagi kasus terhadap perempuan. Disamping jumlah personil yang masih kurang, dari segi kualitas

(keahlian) dirasakan masih memprihatinkan, hal ini dapat diperhatikan pada kualitas aparat polisi wanita yang ditugaskan pada unit Ruang Pelayanan Khusus (RPK).

Upaya Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam Melindungi dan Menjaga Hak-hak Anak Korban Kejahatan Seksual

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya melalui unit P2TP2A Calang bersinergi bersama Polres Aceh Jaya dalam hal ini memberikan perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan. Bentuk perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan dilakukan dengan cara melakukan pendampingan kepada korban dan keluarga korban agar dapat terhindar dari ancaman yang bisa datang dari tersangka maupun keluarga tersangka selama proses penyidikan sampai dengan pemeriksaan disidang pengadilan sehingga korban dalam memberikan kesaksian merasa aman dan tanpa adanya tekanan dari pihak manapun (Hasil Wawancara dengan Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak DPMPKB Calang Suryani, SKM, Tanggal 14 Oktober 2020 di Kantor DPMPKB Calang).

Terkait dalam memberikan keterangan tanpa tekanan. Dalam hal ini, penyidik Unit PPA Polres Aceh Jaya Jummi Oftarika menerangkan bahwa saat korban memberikan keterangan kepada penyidik diungkapkan secara terbuka untuk mengungkapkan kronologis kejahatan seksual yang dialaminya dan agar pelaku dapat segera ditangkap serta dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tanpa adanya tekanan dari pihak penyidik dalam menggali informasi mengenai kejadian yang menimpanya. Korban juga mendapat penerjemah bagi korban yang

kurang lancar dalam berbahasa Indonesia (Hasil Wawancara dengan Ba PPA Polres Aceh Jaya Jummi Oftarika Tanggal 20 Oktober 2020 diruangan unit PPA Polres Aceh Jaya Calang).

Selain itu, Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya Aula Andika Jamal, SH menjelaskan bahwa bagi keluarga korban yang tidak mampu juga akan memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas perlindungan berakhir. Misalnya anak yang menjadi korban tidak sekolah kemudian disekolahkan. Orangtuanya yang tidak memiliki pekerjaan tetap diberikan Sembako dan modal usaha melalui Dinas Sosial Kabupaten Aceh Jaya. Bagi anak yang sampai hamil akibat korban perkosaan, semua biaya persalinan, perlengkapan ibu dan bayinya akan ditanggung oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Jaya melalui Dinas Sosial (Wawancara dengan Kabid.Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial Aula Andika Jamal, SH Tanggal 18 Oktober 2020 di Kantor Dinas Sosil Mobduk Kabupaten Aceh Jaya Calang).

SIMPULAN

Di Aceh Jaya sendiri masih terdapat perlindungan hukum yang belum dapat diterapkan dalam pelaksanaan Restitusi kasus kejahatan seksual terhadap anak. Hal ini dikarenakan karena si anak maupun keluarganya enggan datang ke Kantor Polres Aceh Jaya untuk kelanjutan penyelidikan. Meskipun pihak penyidik sudah berkali-kali mengirim surat pemanggilan melalui keuchik setempat, namun sering tidak membuahkan hasil, sehingga pihak Polres dan P2TP2A yang harus jemput bola ke lapangan. Tidak jarang unit PPA Polres Aceh Jaya bekerjasama dengan unit P2TP2A Aceh Jaya berangkat ke kediaman korban untuk meminta keterangan terkait adanya

laporan kejahatan seksual yang menimpa si anak.

Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya terus berupaya dalam memberikan perlindungan kepada anak korban kejahatan seksual. Tahun 2018 Pemda Aceh Jaya melalui DPMPKB dan Dinas Sosial sudah mengalokasikan dana untuk membantu anak-anak korban tindak pidana kejahatan seksual. Sejak tahun 2018 Pemda Aceh Jaya sudah mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) mengenai penggunaan dana desa, termasuk salah satunya bantuan perlindungan untuk korban kejahatan seksual perkosaan dan pencabulan dapat diambil dari dana desa. Sehingga keluarga korban dapat terbantu dalam memenuhi biaya visum ke RS dan biaya-biaya lain yang diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afdhaliyah, N., Ismansyah, I., & Sabri, F. (2019). Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pencabulan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 21(1), 109-128.
- Hasyim, M. Y. (2017). *ANALISIS PENDAPAT ULAMA NU KUDUS TERHADAP HUKUMAN KEBIRI KIMIA BAGI KEJAHATAN SEKSUAL TERHADAP ANAK*. STAIN Kudus.
- Maidin Gultom, (2008), *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama.
- Mahtumah, R. (2021). *Tindak Tutur Ekspresif Raditya Dika dalam Acara Stand Up Comedy di Sosial Media Youtube*. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER.
- Mashudi, M. (2017). Aspek Hukum Perlindungan Konsumen Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 6(2).
- Michiel Otto dalam Shidarta, (2006), *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama
- Mohara, H. Z. (2018). *Penerapan Sanksi Pidana Anak Sebagai Pelaku Kekerasan Seksual yang Dilakukan Terhadap Anak (Studi Putusan No. 1/PID. SUS-ANAK/2017/PN. TRG)*.
- RAHMAN, R. (n.d.). *Implementasi Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas*

- Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Tindak Pidana Perdagangan Anak (Child Trafficking)*. Tadulako University.
- RISKA, M. A. Y. (2019). *TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK (CHILD TRAFFICKING) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK*. UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH.
- Ronny Hanitijo Soemitro, (1988), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Semarang: Ghalia Indonesia
- SARAH, S. (2017). *SANKSI BAGI TINDAK PIDANA PEDOFILIA MENURUT PERATURAN PEMERINTAH PENGANTI UNDANG-UNDANG (PERPPU) NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM.[SKRIPSI]*. UIN RADEN FATAH PALEMBANG.
- SIHOMBING, T. O. (n.d.). PRO KONTRA SANKSI KEBIRI TERHADAP PELAKU KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK DALAM PRESPEKTIF TUJUAN PEMIDANAAN. *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura*, 5(3).
- Sirait, S. C. (2017). Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Memberikan Pendidikan Kepada Anak Terlantar Dalam Perspektif Undang-Undang Perlindungan Anak. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 158-182.
- Suhartanto, S. (2017). Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Internet Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. *Jurnal Pro Hukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik*, 6(2).
- Soerjono Soekanto, (2019) *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Yusrizal, Budi Bahreisy, Ferdy Saputra, *Legal Aspects Of Protection Of Children And Women Victims Of Crime In Indonesia*, Nomoi Law Review, Volume 2, issue 1, May 2021
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, terakhir dengan *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-undang* dan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana
- Perpres Nomor 75 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Hak-hak Anak Korban dan Anak Saksi